

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Krisis iklim global kini menjadi masalah paling mendesak dalam dua dekade terakhir, memberikan dampak besar dan menyeluruh pada daerah pesisir di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar dengan lebih dari 99.000 kilometer garis pantai. Semarang, yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dan pusat ekonomi regional dengan populasi lebih dari 1,6 juta orang, menjadi contoh nyata daerah yang menghadapi ancaman serius akibat peningkatan permukaan air laut yang terus berlangsung, abrasi pantai yang merusak garis pantai secara signifikan, serta penurunan tanah (*subsidence*) yang rata-rata mencapai 8-10 cm per tahun di beberapa kawasan pesisir utara.

Kondisi yang rumit ini telah memicu kerentanan yang melibatkan aspek sosial dan ekologis secara bersamaan. Di wilayah pesisir utara, khususnya di kelurahan-kelurahan seperti Tambaklorok, Tanjung Mas, Bandarharjo, dan Mangkang Wetan, ribuan warga kehilangan tanah produktif mereka, rumah yang selama ini mereka tempati, serta mata pencaharian pokok sebagai nelayan dan pekerja sektor informal yang hidup dari sumber daya pesisir (Wijaya, 2015). Situasi inilah yang membuat Semarang layak disebut sebagai semacam laboratorium hidup untuk memahami bagaimana faktor ekologi, sosial, ekonomi, dan politik saling bersinggungan ketika sebuah kawasan pesisir di negara berkembang berusaha beradaptasi dengan perubahan iklim apalagi di tengah keterbatasan sumber daya dan lemahnya kapasitas kelembagaan yang ada.

Persoalan banjir yang melanda Kota Semarang menjadi dampak nyata dari perpaduan antara kondisi alam dan kegiatan manusia yang kurang memperhatikan kelestarian lingkungan. Kota yang terletak di tepi laut ini memiliki dataran rendah, bahkan sebagian besar wilayahnya lebih rendah dari permukaan laut, sehingga sangat rawan terhadap banjir rob, luapan air hujan, dan penurunan tanah. Banjir di Semarang bukan sekadar masalah yang datang setiap musim, tetapi juga persoalan lingkungan yang terus berlanjut dan semakin rumit setiap tahunnya. Menurut riset Nurhidayah dan kawan-

kawan (2022), kenaikan permukaan air laut di pesisir utara Jawa tercatat sekitar 8 mm setiap tahun, sementara penurunan tanah di Semarang mencapai 8-10 cm per tahun. Akibatnya, banyak daerah pesisir seperti Genuk, Tanjung Mas, dan Kaligawe terendam air secara permanen. Kondisi ini menandakan adanya kesalahan dalam pengelolaan lingkungan yang lebih berfokus pada pembangunan fisik tanpa mempedulikan kemampuan adaptasi dari alam.

Adanya faktor fisik, dimensi sosial, dan kebijakan yang turut memperparah dampak banjir di kawasan pesisir, proyek-proyek penataan kawasan sering kali mengabaikan keberlanjutan sosial dan lingkungan masyarakat pesisir. Misalnya saja seperti relokasi yang tak memperhatikan mata pencaharian penduduknya sendiri. Menurut Warsilah (2023), implementasi program mitigasi banjir di Semarang cenderung bersifat *top-down*, sehingga tidak menyentuh kebutuhan komunitas rentan seperti nelayan dan buruh tambak. Dalam konteks ini, WALHI Jateng berperan mengkritisi pendekatan tersebut dengan menekankan pentingnya *climate justice* keadilan iklim yang memastikan bahwa kebijakan adaptasi tidak justru menambah penderitaan kelompok miskin kota.

Meminjam dari studi Martuti (2022) yang menunjukkan bahwa frekuensi banjir di Semarang meningkat hingga 27% dalam lima tahun terakhir akibat kombinasi curah hujan ekstrem dan kerusakan ekosistem mangrove. Hal ini mengancam produktivitas ekonomi daerah dan memperbesar risiko kesehatan masyarakat. Di sinilah relevansi advokasi lingkungan menjadi penting, WALHI Jateng tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kebijakan, namun ia juga sebagai fasilitator yang memerjuangkan adaptasi berbasis komunitas, misalnya dengan program restorasi mangrove, edukasi risiko iklim, dan penguatan kapasitas lokal.

Sebab itulah peran kelompok penekan seperti WALHI dalam konteks banjir di Semarang telah mampu mencerminkan dinamika antara kekuasaan, kebijakan, dan keadilan ekologis yang menjadi inti teori peran Mansour Fakih, yakni bagaimana peran sosial dikonstruksi dalam konteks perubahan struktural yang berorientasi pada emansipasi masyarakat dan lingkungan. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan lingkungan yang nyata, muncul kebutuhan untuk memahami bagaimana aktor-aktor sosial berperan dalam menavigasi situasi krisis tersebut. Dalam konteks ini,

WALHI Jateng menempati posisi strategis sebagai organisasi lingkungan yang tidak hanya menjalankan fungsi advokasi, tetapi juga mengartikulasikan suara masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan warga pesisir. Keberadaan WALHI menjadi signifikan karena mampu menjembatani kesenjangan antara kebijakan teknokratis pemerintah dan realitas sosial masyarakat yang terpinggirkan akibat banjir dan kenaikan muka air laut.

Persoalan yang tak kalah krusial yakni mengenai isu nelayan pesisir sebagai kelompok paling rentan terkena dampak nyata oleh krisis iklim di Pesisir Semarang yang tentu memerlukan perhatian khusus. Wilayah pesisir utara Semarang seperti Tambak Lorok, Trimulyo, dan Tanjung Mas, mengalami dampak langsung dari banjir rob yang menyebabkan kehilangan lahan tambak, rusaknya perahu sebagai alat utama, serta menurunnya hasil tangkapan ikan. Fenomena ini timbul dampak ganda yakni secara ekologis, terjadi degradasi ekosistem laut akibat intrusi air laut dan sedimentasi. Sementara secara sosial ekonomi, nelayan menghadapi penurunan pendapatan yang signifikan, memaksa sebagian untuk beralih profesi (Warsilah, 2023). Krisis inilah yang dapat menandai transisi dari masalah lingkungan menjadi persoalan kemanusiaan yang membutuhkan pendekatan adaptasi berbasis keadilan sosial.

Komunitas nelayan yang tinggal di pesisir utara Semarang menjadi bukti paling konkret bagaimana krisis iklim berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Intensitas banjir rob yang terus meningkat ditambah dengan abrasi yang makin menggerus garis pantai membuat para nelayan harus berhadapan dengan berbagai masalah sekaligus. Alat-alat penangkapan ikan mereka rusak, biaya untuk melaut jadi lebih mahal, dan hasil tangkapan pun menurun drastis karena perubahan pola arus laut dan tingkat keasinan air. Penelitian van de Haterd dan rekan-rekannya (2021) mengungkapkan bahwa kerusakan lingkungan di wilayah pesisir ini bukan hanya mengancam mata pencaharian utama para nelayan, tapi juga membahayakan kesehatan warga akibat kondisi sanitasi yang memburuk dan genangan air laut yang tak kunjung surut. Temuan Warsilah (2023) bahkan lebih mengkhawatirkan lebih dari enam puluh persen keluarga nelayan di Tambak Lorok sudah kehilangan sebagian besar harta benda yang mereka andalkan untuk bertahan hidup, semua akibat banjir rob yang datang

berulang kali dan tanah yang terus turun. Di tengah situasi sulit ini, WALHI Jawa Tengah hadir sebagai organisasi yang berjuang membela hak-hak para nelayan agar mereka mendapat perlakuan yang adil dari segi lingkungan hidup.

Lewat berbagai kampanye dan upaya advokasi, WALHI terus mendesak pemerintah daerah supaya tidak cuma fokus pada perbaikan fisik seperti membangun tanggul saja, tapi juga memperhatikan pemberdayaan ekonomi dan sosial warga yang terkena dampak. Martuti (2022) menunjukkan bahwa kerja sama antara pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga lingkungan bisa memperkuat kemampuan komunitas nelayan untuk beradaptasi caranya dengan menggabungkan pendekatan sosial, lingkungan, dan ekonomi dalam kebijakan yang dibuat. Warsilah (2023) menjelaskan bahwa kemampuan komunitas nelayan Semarang bertahan menghadapi banjir rob yang makin sering dan parah itu sebenarnya tidak lepas dari peran organisasi lingkungan yang terus-menerus mendorong perubahan kebijakan, menggugah kesadaran masyarakat tentang pentingnya kelestarian lingkungan, dan membuka ruang bagi warga untuk ikut terlibat dalam merencanakan strategi adaptasi. Karena itu, mengkaji secara mendalam bagaimana WALHI Jateng berperan menjadi sangat penting dan mendesak baik untuk memahami cara mereka mengadvokasi penanganan krisis pesisir, strategi yang dipakai, hambatan yang dihadapi, maupun pengaruhnya terhadap kebijakan di tingkat lokal dan ketangguhan komunitas dalam menghadapi perubahan iklim.

Dari data BPS Kota Semarang dan Dinas Kelautan dan Perikanan (2024) terlihat tren penurunan pendapatan nelayan hingga 39% dalam kurun waktu sembilan tahun terakhir. Penurunan ini berhubungan langsung dengan meningkatnya intensitas rob dan menurunnya produktivitas ekosistem perairan. Fakta ini memperkuat urgensi penelitian tentang peran WALHI Jateng dalam advokasi adaptasi krisis pesisir, karena keberlanjutan kehidupan nelayan tidak hanya bergantung pada daya dukung lingkungan, tetapi juga pada kekuatan politik advokasi yang melindungi hak-hak ekologis mereka (Nurhidayah et al., 2022; Purnomo et al., 2024).

Terkait dinamika adaptasi di pesisir utara Semarang memperlihatkan adanya ketimpangan struktural yang signifikan dalam distribusi peran, tanggung jawab, dan sumber daya antara berbagai aktor dalam sistem tata kelola lingkungan. Pemerintah

daerah kerap berfokus pada pendekatan teknokratik dan solutif jangka pendek melalui pembangunan tanggul laut, sistem drainase, dan infrastruktur fisik lainnya yang memakan biaya besar namun seringkali tidak berkelanjutan, sementara aspek sosial ekologis yang lebih fundamental seperti restorasi ekosistem mangrove, penguatan kapasitas adaptif masyarakat, diversifikasi mata pencaharian, dan partisipasi komunitas dalam perencanaan sering diabaikan atau dianggap sebagai prioritas sekunder. Dalam situasi ketimpangan struktural inilah, WALHI Jateng memainkan fungsi sebagai jembatan kritis antara komunitas terdampak yang tidak memiliki akses langsung ke proses perumusan kebijakan dan pembuat kebijakan publik di tingkat lokal, sekaligus mendorong integrasi perspektif keadilan ekologis, hak-hak masyarakat adat dan lokal, serta prinsip-prinsip keberlanjutan dalam strategi adaptasi pemerintah (Martuti, 2022; Septiarani & Handayani, 2020).

Wilayah pesisir utara Kota Semarang diputuskan sebagai lokus penelitian didasarkan pada kompleksitas persoalan sosial-ekologis yang menjadikannya salah satu kawasan pesisir paling rentan di Indonesia. Wilayah ini menghadapi krisis lingkungan yang bersifat multidimensional, ditandai oleh meningkatnya intensitas banjir rob, penurunan muka tanah, abrasi pantai, serta degradasi ekosistem pesisir yang berlangsung secara sistemik dan berkelanjutan. Krisis tersebut tidak semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah, melainkan juga berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan perkotaan dan pesisir yang eksploitatif, seperti industrialisasi kawasan pesisir, alih fungsi lahan, serta proyek infrastruktur yang kurang mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir, khususnya nelayan dan warga pesisir miskin, yang berada pada posisi paling rentan dalam menghadapi perubahan lingkungan dan kebijakan pembangunan. Pesisir utara Semarang dengan demikian menjadi ruang sosial yang strategis untuk mengkaji bagaimana relasi antara negara, korporasi, dan masyarakat beroperasi dalam konteks krisis ekologis. Lebih jauh, wilayah ini juga menjadi arena penting bagi praktik advokasi lingkungan oleh organisasi masyarakat sipil seperti WALHI Jawa Tengah, yang secara aktif terlibat dalam pendampingan masyarakat, advokasi kebijakan, serta kritik terhadap pembangunan yang memperparah kerentanan pesisir. Oleh karena itu, pesisir utara Kota Semarang dipilih bukan hanya karena tingkat kerusakan lingkungannya, tetapi karena relevansinya sebagai

ruang empirik untuk menganalisis peran LSM dalam advokasi adaptasi krisis pesisir secara struktural dan berkeadilan.

Kesenjangan sistemik ini menjadi titik krusial untuk memahami mengapa peran advokasi WALHI menjadi sangat penting dan strategis dalam menciptakan adaptasi yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif secara sosial, berkeadilan dalam distribusi sumber daya, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Secara teoritis, analisis ini didasarkan pada Teori Peran yang dikembangkan oleh Mansour Fakih, yang menekankan pentingnya relasi sosial dan struktur kekuasaan dalam pembentukan identitas serta fungsi aktor dalam masyarakat, khususnya dalam konteks perubahan sosial dan transformasi kebijakan. Teori ini memandang bahwa peran sosial bukan hanya posisi statis atau atribut yang melekat pada individu atau organisasi, namun hasil dari konstruksi sosial yang terus dinegosiasikan, diperebutkan, dan didefinisikan ulang dalam konteks perubahan sosial, politik, dan ekologis yang dinamis (Fakih, 1996).

Sejalan dengan sudut pandang Teori Peran yang dianalisis oleh Mansour Fakih, organisasi seperti WALHI tidak hanya bertugas menjalankan peran normatif, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan kesadaran kritis di kalangan masyarakat yang mendorong adanya perubahan sosial dan lingkungan. Proses adaptasi di kalangan komunitas pesisir dapat berjalan dengan baik jika didukung oleh kerjasama yang baik antara gerakan sosial dan kebijakan publik yang adil. Masalah yang ada tidak hanya menyangkut aspek fisik lingkungan yang bisa diukur dengan mudah, tetapi juga berkaitan dengan dimensi sosial yang lebih rumit, termasuk kemampuan masyarakat untuk beradaptasi, struktur sosial ekonomi yang rentan, ketidakmerataan akses terhadap informasi dan teknologi, serta peran penting berbagai pihak non-pemerintah dalam mengelola risiko dan mendukung proses adaptasi berbasis masyarakat. Organisasi non-pemerintah (NGO) seperti WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia), khususnya yang berada di Jawa Tengah, memiliki peran penting dan multifungsi dalam memperjuangkan lingkungan, memantau kebijakan publik, mendidik tentang isu-isu ekologis, serta memberdayakan masyarakat pesisir yang terpinggirkan, terutama dalam upaya menegakkan keadilan ekologis dan sosial yang kerap kali diabaikan dalam pendekatan teknokratik dari pemerintah. Dalam konteks WALHI Jateng, teori ini dapat

menjelaskan secara komprehensif bagaimana organisasi lingkungan membentuk dan menegaskan peran advokatifnya melalui interaksi strategis dengan pemerintah daerah, komunitas pesisir, akademisi, media, dan jaringan masyarakat sipil lintas sektor, serta bagaimana peran tersebut dilegitimasi melalui kredibilitas, konsistensi, dan kapasitas organisasi dalam mengadvokasi kepentingan ekologis dan sosial. Sebagaimana ditunjukkan oleh van de Haterd et al. (2021), keberhasilan kebijakan adaptasi di pesisir Semarang sangat bergantung pada keterlibatan aktif dan substantif dari aktor-aktor lokal, legitimasi sosial yang mereka miliki di tingkat komunitas, serta kemampuan mereka untuk menerjemahkan pengetahuan lokal menjadi input kebijakan yang konkret dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang paling rentan.

Secara konseptual, penelitian ini mencakup peran organisasi lingkungan khususnya WALHI Jateng sebagai representasi organisasi masyarakat sipil yang memiliki fokus pada advokasi lingkungan dan advokasi adaptasi krisis pesisir sebagai proses strategis yang melibatkan berbagai aktivitas mulai dari kampanye publik, lobby kebijakan, hingga pemberdayaan komunitas. Peran organisasi diartikan sebagai seperangkat fungsi, tanggung jawab sosial, kapasitas strategis, dan legitimasi yang dijalankan oleh suatu organisasi untuk mencapai perubahan struktural dalam sistem sosial dan kebijakan publik, khususnya dalam konteks keadilan ekologis dan keberlanjutan lingkungan (Fakih, 1996). Sementara advokasi adaptasi diartikan sebagai upaya strategis, sistematis, dan terorganisir untuk memperkuat kapasitas adaptif masyarakat, mendorong kebijakan yang responsif terhadap dampak perubahan iklim, memfasilitasi partisipasi komunitas dalam perencanaan, serta mengadvokasi alokasi sumber daya yang adil untuk mendukung adaptasi berbasis masyarakat (Nurhidayah et al., 2022). Hubungan antara kedua variabel ini bersifat interdependen dan dialektis, di mana efektivitas advokasi sangat dipengaruhi oleh legitimasi, kapasitas organisasi, dan kemampuan WALHI dalam membangun jaringan kolaboratif dengan berbagai stakeholder, sementara pada saat yang sama, proses advokasi itu sendiri terus membentuk dan memperkuat peran organisasi dalam ekosistem tata kelola lingkungan lokal.

Fenomena yang terjadi di Semarang memperlihatkan bahwa mengatasi krisis pesisir tidak bisa hanya mengandalkan pembangunan infrastruktur atau perbaikan fisik

semata. Dibutuhkan perubahan yang jauh lebih mendasar mulai dari bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana sumber daya ekonomi dan politik dibagi, sampai cara pandang pembangunan itu sendiri yang harus lebih mengutamakan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. WALHI Jawa Tengah, yang memiliki akar gerakan lingkungan yang solid, jaringan kuat hingga ke tingkat grassroots, dan kepercayaan publik yang terbangun dari kerja konsisten mereka selama bertahun-tahun, tampil sebagai penggerak perubahan sosial dan ekologis. Mereka menggugat model pembangunan yang hanya mengejar keuntungan modal dan menguras sumber daya alam, sekaligus memperjuangkan pendekatan yang menempatkan hak-hak warga lokal, kelestarian alam, dan kesejahteraan rakyat sebagai hal utama yang harus dipikirkan dalam setiap kebijakan adaptasi.

Cara kerja dari WALHI ini selaras dengan temuan Purnomo dan kawan-kawan (2024). Mereka menekankan bahwa dalam menghadapi perubahan iklim di wilayah pesisir yang kondisinya makin rumit dan sulit ditebak, kebijakan harus berbasis pada komunitas, melibatkan kerja sama antara berbagai pihak, dan memasukkan pengetahuan lokal yang selama ini ada di masyarakat. Dari perspektif metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan paradigma interpretatif untuk memahami secara mendalam dan kontekstual peran WALHI dalam konteks sosial, kelembagaan, dan politik di Semarang. Melalui kombinasi metode pengumpulan data yang meliputi wawancara mendalam dengan berbagai stakeholder kunci, analisis data atau dokumen kebijakan dan program, observasi partisipatif terhadap aktivitas advokasi, serta kajian literatur yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis bentuk-bentuk konkret peran WALHI, strategi advokasi yang digunakan, mekanisme pengaruh terhadap kebijakan, pola kolaborasi dengan berbagai aktor, serta tantangan struktural dan sosial yang dihadapi dalam mengadvokasi kebijakan adaptasi yang lebih responsif dan berkeadilan.

Pendekatan interpretatif ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap makna sosial di balik tindakan advokatif, motivasi dan nilai-nilai yang mendasari strategi organisasi, serta bagaimana peran tersebut berkontribusi terhadap keberlanjutan ekosistem pesisir dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang rentan (Martuti, 2022).

Urgensi penelitian ini terletak pada kontribusinya yang signifikan terhadap pemahaman teoritis dan praktis mengenai relasi kompleks antara gerakan lingkungan, organisasi masyarakat sipil, dan kebijakan adaptasi perubahan iklim dalam konteks tata kelola multilevel. Dengan meningkatnya risiko banjir rob yang menggenangi pemukiman secara rutin, abrasi pantai yang menggerus ratusan meter garis pantai setiap tahunnya, dan penurunan muka tanah yang terus berlanjut di pesisir utara Semarang, kebijakan adaptasi yang efektif, responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal, dan berkeadilan dalam distribusi sumber daya menjadi kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda lagi.

Dalam konteks pembangunan dan tata kelola lingkungan di Indonesia, lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis sebagai aktor masyarakat sipil yang menjalankan fungsi advokasi, pengawasan, dan kelompok penekan (*pressure group*) terhadap kebijakan publik yang seringkali bias terhadap kepentingan negara dan korporasi. LSM tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana program sosial atau mitra teknis pemerintah dalam implementasi kebijakan pembangunan, tetapi juga sebagai kekuatan penyeimbang yang bersifat kritis dalam relasi kuasa yang timpang antara negara, pasar, dan masyarakat. Melalui fungsi advokasi, LSM berperan mengartikulasikan kepentingan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam isu lingkungan hidup yang sarat dengan konflik kepentingan antara akumulasi kapital dan keberlanjutan ekologis. Sebagai kelompok penekan, LSM menggunakan berbagai strategi seperti kampanye publik untuk membangun opini massa, advokasi kebijakan melalui jalur formal dan informal, pendampingan hukum bagi korban eksploitasi lingkungan, serta mobilisasi gerakan sosial untuk mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

LSM juga menjalankan fungsi pengawasan (*watchdog*) dengan memantau implementasi kebijakan lingkungan, mengkritisi penyimpangan atau pelanggaran prosedur yang merugikan masyarakat, serta menuntut akuntabilitas pemerintah dan pelaku usaha yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Fungsi edukatif LSM juga menjadi instrumen penting dalam membangun kesadaran kritis masyarakat mengenai hak-hak ekologis, dampak struktural dari pembangunan yang eksploitatif, serta

pentingnya partisipasi aktif dalam mengawal kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka. Dalam konteks krisis pesisir utara Kota Semarang, ketiga fungsi LSM tersebut yakni advokasi, pengawasan, dan tekanan politik menjadi sangat krusial karena masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan warga pesisir, sering kali berada pada posisi tawar yang lemah dalam menghadapi proyek pembangunan infrastruktur dan kebijakan lingkungan yang bersifat *top-down*. Tanpa kehadiran LSM sebagai mediator kritis, suara komunitas pesisir berpotensi terabaikan dalam diskursus pembangunan yang didominasi oleh logika teknokratis dan pertimbangan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, keberadaan LSM sebagai aktor advokasi, pengawas kebijakan, dan kelompok penekan menjadi elemen kunci dalam memperjuangkan keadilan ekologis serta memastikan bahwa proses pembangunan dan adaptasi perubahan iklim tidak mengabaikan kepentingan, hak-hak dasar, dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang paling rentan terhadap dampak krisis lingkungan.

Pemilihan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jawa Tengah sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada sejumlah pertimbangan strategis yang berkaitan dengan karakteristik kelembagaan, orientasi ideologis, serta konsistensi perannya dalam advokasi lingkungan yang bersifat struktural dan transformatif. Berbeda dengan sejumlah LSM lingkungan lain yang cenderung berfokus pada kegiatan teknis, edukatif, atau berbasis proyek jangka pendek dengan pendekatan yang lebih akomodatif terhadap kebijakan pemerintah, WALHI memiliki posisi strategis sebagai organisasi payung gerakan lingkungan yang secara historis dan ideologis berkomitmen pada perjuangan keadilan ekologis dalam kerangka transformasi sosial. WALHI tidak sekadar melakukan kampanye lingkungan atau pendampingan komunitas secara parsial, melainkan secara aktif dan konsisten mengkritisi kebijakan pembangunan yang eksploitatif serta menantang relasi kuasa yang timpang antara negara, korporasi, dan masyarakat terdampak melalui pendekatan advokasi yang terintegrasi antara dimensi saintifik, hukum, dan pemberdayaan akar rumput.

Dalam konteks pesisir utara Kota Semarang, WALHI Jawa Tengah secara konsisten terlibat dalam advokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim, pendampingan masyarakat pesisir yang terdampak banjir rob, serta penolakan terhadap proyek-proyek

pembangunan yang memperparah krisis ekologis seperti reklamasi pantai dan pembangunan infrastruktur yang mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan dan keadilan sosial. Karakter advokasi yang bersifat kritis, independen, dan berorientasi pada transformasi struktural inilah yang membedakan WALHI dari LSM lingkungan lainnya yang cenderung beroperasi dalam paradigma konformis atau reformis. Kekhasan ini sekaligus menjadikan WALHI sangat relevan untuk dianalisis menggunakan kerangka teori peran LSM menurut Mansour Fakih, khususnya dalam paradigma transformatif yang menekankan pada perubahan kesadaran kritis, penguatan kemandirian masyarakat, dan restrukturisasi relasi sosial-politik dalam tata kelola lingkungan. Oleh karena itu, WALHI dipandang tidak hanya sebagai pelaksana program lingkungan teknis semata, tetapi sebagai aktor masyarakat sipil yang merepresentasikan perjuangan ekologis berbasis keadilan dalam menghadapi krisis pesisir secara sistemik, partisipatif, dan berkelanjutan.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) memiliki peran strategis sebagai aktor masyarakat sipil yang menjalankan fungsi advokasi, pengawasan, dan kelompok penekan (pressure group) terhadap kebijakan publik yang seringkali bias terhadap kepentingan negara dan korporasi. LSM tidak sekadar berfungsi sebagai pelaksana program sosial atau mitra teknis pemerintah, tetapi juga sebagai kekuatan penyeimbang yang bersifat kritis dalam relasi kuasa yang timpang antara negara, pasar, dan masyarakat. Melalui fungsi advokasi, LSM berperan mengartikulasikan kepentingan kelompok rentan yang sering kali terpinggirkan dalam proses perumusan kebijakan, khususnya dalam isu lingkungan hidup yang sarat dengan konflik kepentingan antara akumulasi kapital dan keberlanjutan ekologis.

WALHI Jawa Tengah secara konkret menjalankan ketiga fungsi tersebut dalam konteks krisis pesisir utara. Sebagai watchdog, WALHI Jateng mengkritisi proyek pembangunan tanggul laut di Tanjung Mas yang dinilai justru memperparah amblesan tanah, serta mendesak penghentian pembangunan eksploitatif ketika tanggul laut di Tambak Mulyo dan Sungai Meduri jebol pada 2022 dengan menyebutnya sebagai "bencana yang diundang oleh manusia" (Kompas.com, 2022). Fungsi advokasi berbasis data dijalankan melalui riset kolaboratif berdasarkan 18 artikel jurnal tentang pencemaran

merkuri di Teluk Semarang yang melibatkan 48 perusahaan industri, yang hasilnya digunakan untuk mendesak audit lingkungan dan evaluasi perizinan pembuangan limbah. WALHI Jateng juga menggunakan data kuantitatif seperti fakta 109 desa pesisir di Jawa Tengah yang terancam tenggelam untuk memperkuat argumen advokasinya (WALHI, 2025). Sebagai pressure group, WALHI Jateng secara tegas menolak RPJPN 2005-2025 yang dianggap tidak mengutamakan keadilan iklim dan mengkritisi proyek Tol Tanggul Laut Semarang-Demak yang memperparah kerusakan ekosistem pesisir serta mempersempit ruang tangkap nelayan (WALHI, 2023).

Fungsi advokasi hukum tercermin dalam *track record* litigasi seperti gugatan terhadap izin lingkungan PLTU Tanjung Jati A yang dinilai tidak memuat isu perubahan iklim, serta gugatan yang memenangkan pembatalan izin tambang semen di Rembang dan Pati di tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung (Repository UBH Rajaya, 2022). Dalam dimensi pemberdayaan grassroots, WALHI Jateng melaksanakan program Kawasan Pemulihan Pesisir (KPP) di Tambakrejo, Bedono, dan Batang yang tidak hanya fokus pada rehabilitasi mangrove tetapi juga penguatan ekonomi masyarakat melalui diversifikasi mata pencaharian seperti rumpon kerang hijau dan pengolahan hasil tangkapan (WALHI, 2025). Program edukatif dijalankan melalui Media Fellowship "Jurnalis Peduli Pesisir" yang melibatkan 15 jurnalis untuk menyuarakan krisis pesisir dan membangun kesadaran publik (WALHI, 2025). Dalam konteks krisis pesisir utara Kota Semarang, ketiga fungsi LSM tersebut menjadi sangat krusial karena masyarakat terdampak, khususnya nelayan dan warga pesisir, sering kali berada pada posisi tawar yang lemah dalam menghadapi proyek pembangunan infrastruktur dan kebijakan lingkungan yang bersifat top-down. Oleh karena itu, keberadaan WALHI Jateng sebagai aktor advokasi, pengawas kebijakan, dan kelompok penekan menjadi elemen kunci dalam memperjuangkan keadilan ekologis serta memastikan bahwa proses pembangunan dan adaptasi perubahan iklim tidak mengabaikan kepentingan, hak-hak dasar, dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir yang paling rentan terhadap dampak krisis lingkungan.

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan dan adaptasi perubahan iklim,

serta menjadi rujukan yang berbasis bukti empiris bagi pembuat kebijakan di tingkat lokal dan provinsi, praktisi lingkungan, aktivis masyarakat sipil, serta komunitas internasional yang menghadapi tantangan serupa di wilayah pesisir negara berkembang. Penting disadari bahwa keberlanjutan lingkungan pesisir Semarang dan kesejahteraan masyarakat yang bergantung padanya tidak dapat dicapai tanpa kolaborasi sinergis dan deliberatif antara masyarakat sebagai subjek yang paling terdampak, pemerintah sebagai pemegang otoritas dan sumber daya publik, dan organisasi lingkungan seperti WALHI sebagai fasilitator, advokat, dan pengawas kebijakan.

Oleh karenanya, pemetaan sistematis terhadap peran, strategi advokasi, mekanisme pengaruh, dan tantangan yang dihadapi WALHI Jateng menjadi fondasi yang sangat penting dalam membangun tata kelola adaptasi yang partisipatif, inklusif, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Dengan memahami dinamika kompleks tersebut secara mendalam dan kontekstual, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi akademik yang signifikan terhadap pengembangan teori tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam tata kelola lingkungan, tetapi juga menghasilkan relevansi praktis yang tinggi dalam mendukung formulasi dan implementasi kebijakan adaptasi yang berbasis pada prinsip keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekosistem pesisir.

Penelitian ini sangat relevan secara akademik dan praktis. Dari perspektif akademik, hasil penelitian dapat memperkaya literatur *governance* iklim di tingkat lokal, khususnya peran LSM advokasi dalam adaptasi perubahan iklim di kota pesisir. Penelitian ini secara eksplisit mengisi gap teoretis dan empiris yang ada dalam literatur tentang peran organisasi masyarakat sipil dalam advokasi adaptasi perubahan iklim, khususnya dalam memahami bagaimana peran tersebut dikonstruksi, dinegosiasikan, dan dijalankan di tingkat regional dan lokal dalam konteks keterbatasan kapasitas pemerintah dan tekanan ekologis yang tinggi. Dari sisi praktis, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi masukan konkrit bagi WALHI Jateng, pemerintah Kota Semarang, dan komunitas pesisir untuk merumuskan rencana adaptasi yang lebih inklusif, kuat, dan tentunya menghadirkan keberkelanjutan yang dirasakan kebermanfaatannya.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Menilik Latar Belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi krisis pesisir utara Kota Semarang?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulis dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan dan mengetahui secara gamblang peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi krisis pesisir utara Kota Semarang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan positif untuk kepentingan negara (pada umumnya), di samping itu dapat berguna sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat terkait peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi perubahan iklim di pesisir utara Kota Semarang Selain itu, diharapkan dapat memperkuat teori-teori yang sudah ada sebelumnya, serta dapat menjadi tambahan referensi dan wawasan terhadap penelitian sejenis lainnya.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber data dan informasi yang bermanfaat bagi penulis (pada khususnya) dan bagi para pembaca (pada umumnya).
2. Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi civitas akademika di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro serta diharapkan mampu memberikan kritik dan saran kepada para pemangku kepentingan.

## **1.5 Kerangka Teori**

### **1.5.1 Penelitian Terdahulu**

Diskursus mengenai kerentanan bio-fisik di pesisir utara Jawa telah banyak dielaborasi dalam berbagai literatur saintifik, salah satunya melalui kajian kuantitatif yang dilakukan oleh Andnur, Widada, dan Suryo (2022). Penelitian tersebut menginvestigasi fenomena penenggelaman pesisir (*coastal submergence*) di utara Kota Semarang sebagai implikasi logis dari interaksi resiprokal antara kenaikan muka air laut (berdasarkan nilai *Mean Sea Level* dan *High Highest Water Level*) serta eskalasi laju penurunan muka tanah (*land subsidence*) yang ekuivalen dengan 8,3 cm per tahun. Dalam merespons determinasi ekologis tersebut, Andnur dkk. (2022) mengajukan intervensi adaptif yang bersifat teknokratik, yakni rekomendasi peninggian struktur elevasi lantai bangunan sebesar 1,6 meter dalam kerangka waktu lima tahun, sebagai mekanisme mitigasi reaktif bagi warga dalam menghadapi penetrasi banjir rob yang kian masif.

Penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2020) berjudul “Gerakan Sosial Lingkungan WALHI dalam Advokasi Kebijakan Lingkungan di Indonesia” menguraikan bagaimana WALHI berperan dalam mengawal kebijakan pembangunan berkelanjutan melalui advokasi hukum dan kampanye publik. Namun, fokus penelitian tersebut masih berada pada tataran nasional, sehingga belum menyentuh dimensi lokal seperti peran cabang daerah WALHI dalam menghadapi persoalan ekologis spesifik di wilayah pesisir.

Penelitian lain oleh Salsabila dan Wibowo (2021) berjudul “Strategi Advokasi WALHI terhadap Kebijakan Pertambangan di Kalimantan Timur” menunjukkan bagaimana WALHI melakukan pendekatan hukum dan kampanye politik lingkungan untuk menolak izin tambang yang merusak ekosistem. Studi ini menekankan efektivitas jaringan advokasi multi-level, namun fokusnya masih sebatas pada isu eksploitasi tambang, bukan pada krisis adaptasi lingkungan akibat perubahan iklim di daerah pesisir.

Kompleksitas kerentanan kawasan pesisir secara ekuivalen juga dikonfirmasi oleh Wibowo, Hartoko, dan Ambariyanto (2015) melalui pemodelan kerentanan fisik di pesisir Kota Tegal. Studi ini mendiagnosis bahwa karakteristik geomorfologis berupa unit

dataran aluvial (*alluvial plains*) yang masih mengalami proses konsolidasi alamiah menjadi variabel independen paling determinan dalam memicu terjadinya penurunan muka tanah. Lebih lanjut, hasil analisis spasial mengklasifikasikan wilayah kajian ke dalam spektrum kerentanan tingkat sedang (*moderate vulnerable*), di mana laju *land subsidence* diidentifikasi sebagai faktor predisposisi esensial yang mendikte perluasan eskalasi genangan rob di masa depan.

Kehadiran literatur diatas memberikan justifikasi empiris yang kokoh mengenai keparahan krisis ekologis berupa degradasi tanah dan intrusi rob yang mengepung kawasan pesisir utara. Kendati demikian, konstelasi pemikiran dari Andnur dkk. (2022) maupun Wibowo dkk. (2015) masih beroperasi dalam kerangka positivistik yang memosisikan kerentanan adaptasi semata-mata sebagai problem teknis, spasial, dan rekayasa infrastruktur fisik. Kekosongan kajian (*research gap*) inilah yang secara strategis diisi oleh penelitian ini. Alih-alih mereduksi krisis pesisir sebagai fenomena alamiah belaka, penelitian ini merekonstruksinya sebagai persoalan tata kelola sosial-politik dengan memfokuskan analisis pada peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah. Penelitian ini berupaya membedah bagaimana institusi masyarakat sipil mentransformasikan realitas ancaman ekologis tersebut ke dalam arena advokasi kebijakan, guna memastikan bahwa orkestrasi adaptasi krisis pesisir di Semarang Utara mampu melampaui sekadar solusi beton atau modifikasi bangunan, dan lebih menitikberatkan pada perlindungan hak ekologis serta emansipasi keadilan bagi entitas masyarakat rentan terdampak.

Dari keempat penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa posisi penelitian ini menempati ruang interseksional antara kajian advokasi lingkungan dan tata kelola adaptasi krisis pesisir. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang menekankan aspek teknokratis dan nasional, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada peran WALHI Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi krisis pesisir di Semarang Utara. Dengan pendekatan teori Peran, Advokasi Lingkungan, Adaptasi Krisis Pesisir penelitian ini memperkuat pemahaman tentang bagaimana organisasi lingkungan berperan dalam

mengubah struktur kebijakan dan membangun kesadaran ekologis komunitas pesisir melalui strategi advokasi multilevel.

### **1.5.2 Peran LSM**

Teori peran LSM yang dikembangkan oleh Mansour Fakih berangkat dari pandangan kritis bahwa setiap individu dan kelompok sosial memiliki posisi dan fungsi tertentu dalam struktur sosial yang lebih luas, namun posisi tersebut tidak bersifat netral melainkan terbentuk dalam konteks relasi kekuasaan yang seringkali ada ketimpangan. Dalam konteks perubahan sosial, peran bukan sekadar fungsi statis yang dijalankan secara mekanis, melainkan manifestasi dari kesadaran dan tindakan sosial yang bertujuan untuk mengubah relasi kuasa yang tidak adil. Fakih (1996) menegaskan bahwa peran sosial harus dibaca secara kritis karena sering kali dibentuk dan direproduksi oleh sistem yang melanggengkan ketidakadilan, termasuk struktur ekonomi-politik yang memperkuat ketimpangan antara masyarakat, negara, dan korporasi. Dengan demikian, teori peran yang dikemukakan Fakih secara fundamental berfokus pada dimensi transformasi sosial, di mana peran tidak hanya dijalankan secara pasif, tetapi juga dikritisi, dinegosiasikan, dan direkonstruksi untuk membangun tatanan yang lebih adil secara sosial dan ekologis.

Dalam konteks organisasi masyarakat sipil, teori ini memberikan kerangka konseptual yang kuat dan relevan untuk memahami bagaimana lembaga seperti WALHI mengambil posisi strategis sebagai agen perubahan dalam ekosistem tata kelola lingkungan. Peran advokatif yang dijalankan WALHI tidak hanya terbatas pada penyuaaran isu lingkungan atau dokumentasi kerusakan ekologis, tetapi juga mencakup pembentukan kesadaran kritis masyarakat terhadap akar ketimpangan struktural yang menyebabkan krisis ekologis dan kerentanan sosial. Sebagaimana dijelaskan oleh Nurhadi dan Yulianingsih (2021), teori peran menjadi sangat relevan ketika organisasi non-pemerintah berfungsi sebagai perantara strategis antara masyarakat yang menjadi korban kebijakan pembangunan dan sistem pemerintahan yang sering kali abai atau tidak responsif terhadap aspek keadilan ekologis dan hak-hak komunitas lokal. Dalam dinamika ini, organisasi masyarakat sipil tidak hanya berperan sebagai mediator teknis,

tetapi juga sebagai katalis yang mendorong transformasi kesadaran dan praktik tata kelola yang lebih inklusif.

Penerapan teori peran Mansour Fakih dalam studi politik lingkungan memperluas pemahaman teoritis tentang relasi kekuasaan yang kompleks antara aktor negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil dalam konteks pengelolaan sumber daya alam dan kebijakan lingkungan. Dalam konteks advokasi lingkungan, Fakih memandang peran masyarakat sipil sebagai kekuatan alternatif yang memiliki potensi untuk mendemokratisasi proses kebijakan publik dan menantang hegemoni ekonomi kapitalistik yang cenderung mengeksploitasi lingkungan demi akumulasi kapital. Sejalan dengan perspektif ini, Wahyudi (2022) menekankan bahwa teori peran dalam advokasi lingkungan berfungsi sebagai perangkat analisis kritis untuk memahami dinamika kekuasaan dalam gerakan sosial, khususnya ketika organisasi masyarakat seperti WALHI berhadapan dengan kepentingan ekonomi dan politik yang dominan di tingkat lokal maupun nasional. Dalam kerangka teoritis Fakih, konsep peran juga dikaitkan secara intrinsik dengan kesadaran kritis (*critical consciousness*) yang memungkinkan aktor sosial untuk melampaui peran konvensional mereka dan bertindak sebagai agen transformasi. Oleh karena itu, ketika WALHI menjalankan advokasi di pesisir utara Semarang, organisasi ini tidak sekadar menjadi perantara komunikasi antara masyarakat dan pemerintah, melainkan berperan sebagai fasilitator perubahan struktural yang mengedepankan prinsip keadilan ekologis dan keberlanjutan. Menurut Fakih (1996), peran LSM tidak bersifat tunggal atau netral, melainkan merupakan hasil dari pergulatan ideologis dan praksis antara negara, pasar, dan masyarakat sipil. Dalam konteks tersebut, LSM dipandang sebagai aktor sosial yang memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam transformasi sosial, namun juga berisiko terjebak dalam kooptasi kekuasaan apabila tidak memiliki kesadaran kritis terhadap struktur yang menindas.

Fakih berpendapat bahwa ada tiga paradigma peran utama LSM, pertama konformis, kedua reformis, dan ketiga transformatif. Ketiga paradigma ini tidak berdiri secara dikotomis, melainkan berada dalam spektrum ideologis yang menunjukkan sejauh mana LSM memosisikan diri terhadap sistem sosial, politik, dan ekonomi yang ada.

Pemahaman atas ketiga paradigma ini penting untuk menganalisis orientasi gerakan sosial lingkungan seperti WALHI dalam konteks advokasi adaptasi pesisir utara Kota Semarang.

#### 1) Peran Konformis (Tradisional)

Peran konformis yang dimaksud yakni peran LSM yang bersifat adaptif dan akomodatif terhadap struktur kekuasaan yang ada. Dalam kerangka ini, LSM lebih banyak berfungsi sebagai pelengkap kebijakan pemerintah atau lembaga penyalur diluar pemerintahan, dan cenderung menerima kerangka pembangunan yang telah ditentukan tanpa banyak mempertanyakan akar ketimpangan struktural yang melingkupinya. Fakhri (2003) menyebut paradigma ini sebagai bentuk “LSM birokratis” yang bekerja dalam logika proyek, mengutamakan keberlanjutan organisasi secara administratif ketimbang transformasi sosial substantif.

Dalam konteks lingkungan, biasanya hanya berperan dalam kegiatan teknis seperti penanaman pohon, kampanye simbolik, atau pelatihan, tanpa menantang akar kebijakan yang menyebabkan eksploitasi ekologis. Paradigma ini sering muncul karena adanya ketergantungan pada pendanaan eksternal dan relasi patronase dengan pemerintah atau korporasi. Dengan demikian, peran konformis mencerminkan bentuk keterlibatan yang pasif, di mana LSM lebih menjadi “mitra pembangunan” daripada agen perubahan sosial.

#### 2) Peran Reformis (Modern)

Peran reformis menempatkan LSM sebagai aktor yang berusaha melakukan perubahan sosial secara bertahap dalam sistem yang ada, tanpa secara langsung menantang struktur kekuasaan secara fundamental. Fakhri (1996) menjelaskan bahwa paradigma ini muncul dari keyakinan bahwa perubahan dapat dicapai melalui negosiasi, advokasi kebijakan, dan penguatan kapasitas masyarakat. LSM berperan sebagai mediator antara masyarakat dan pemerintah, memperjuangkan reformasi kebijakan agar lebih berpihak pada kelompok marjinal.

Pada fokus ini, LSM mulai menumbuhkan kesadaran kritis, namun strategi yang digunakan masih bersifat kompromis dan institusional. WALHI Jateng, misalnya, dapat dikategorikan menjalankan peran reformis ketika melakukan advokasi kebijakan lingkungan dengan cara berkolaborasi dengan pemerintah daerah, menyampaikan kajian ilmiah, dan terlibat dalam forum perumusan peraturan daerah tentang pengelolaan pesisir. Paradigma reformis mengandaikan bahwa perubahan sosial dapat dihasilkan melalui kebijakan publik yang inklusif dan partisipatif, meskipun perubahan tersebut tetap berada dalam kerangka sistem politik yang ada.

### 3) Peran Transformatif (Kritis)

Peran transformatif merupakan inti dari teori Fakih yang menekankan pada perubahan sosial yang mendasar dan sistemik. Dalam perspektif ini, peran bukan hanya menjalankan fungsi sosial yang sudah mapan, tetapi justru menjadi instrumen untuk mengubah struktur ketidakadilan dalam bidang ekonomi, sosial, maupun ekologi. Peran transformatif juga sebagai bentuk peran tertinggi menurut Fakih, yang mana LSM berfungsi sebagai agen perubahan struktural yang berupaya menggugat akar ketidakadilan sosial, ekonomi, dan ekologis. Dalam paradigma ini, LSM tidak hanya bertujuan memperbaiki sistem, tetapi juga mentransformasikan kesadaran masyarakat agar mampu melakukan perubahan secara kolektif. Fakih (2003) menekankan bahwa paradigma transformatif menuntut LSM untuk berpihak secara tegas pada kelompok tertindas, memperjuangkan demokratisasi, dan menolak kooptasi oleh kekuasaan maupun kapital.

Dalam konteks penelitian ini, peran transformatif menjadi kunci dalam menganalisis peran WALHI Jateng dalam advokasi adaptasi pesisir utara Kota Semarang. WALHI tidak sekadar memfasilitasi program teknis atau kebijakan, melainkan membangun kesadaran ekologis masyarakat pesisir untuk menolak proyek pembangunan yang merusak, menuntut tanggung jawab korporasi, dan memperjuangkan keadilan ekologis di tingkat lokal. Peran transformatif ini mencerminkan ciri utama teori Fakih

bahwa perubahan sejati hanya dapat dicapai melalui kesadaran kritis dan aksi kolektif yang menentang struktur penindasan ekologis.

Dalam konteks penelitian tentang peran WALHI Jateng dalam advokasi adaptasi perubahan iklim di pesisir Semarang, kerangka tiga dimensi peran ini memberikan instrumen analitis yang kaya untuk membedah kompleksitas strategi, mekanisme pengaruh, dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam menjalankan fungsi advokasinya. Teori peran Mansour Fakih, dengan penekanannya pada transformasi struktural, kesadaran kritis, dan keberpihakan kepada kelompok marginal, menjadi landasan teoretis yang sangat relevan dan kuat untuk memahami bagaimana organisasi masyarakat sipil dapat berkontribusi secara signifikan terhadap tata kelola lingkungan yang lebih demokratis, inklusif, dan tentu berkelanjutan.

### **1.5.3 Advokasi Lingkungan**

Dalam perspektif teoretis Robert Cox (2010), advokasi lingkungan dipahami sebagai sebuah tindakan komunikatif strategis yang beroperasi dalam ruang publik untuk mengubah relasi kuasa dan mempengaruhi kebijakan lingkungan yang lebih responsif terhadap keadilan ekologis. Cox menegaskan bahwa advokasi bukan sekadar aktivitas penyebaran informasi atau kampanye kesadaran semata, melainkan merupakan upaya deliberatif untuk melakukan pemaknaan ulang (reframing) terhadap narasi krisis lingkungan guna mendorong perubahan sosial dan transformasi kebijakan yang fundamental. Dalam menjalankan peran advokasi tersebut, organisasi masyarakat sipil seperti WALHI Jawa Tengah mengintegrasikan tiga dimensi utama yang saling berkelindan dan memperkuat satu sama lain untuk menciptakan tekanan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan kerangka teoritis Cox, terdapat triangulasi strategi dimensi utama advokasi lingkungan yang saling berkelindan, yaitu:

- 1). Advokasi Berbasis Data (Saintifik)

Dimensi ini menempatkan data empiris, kajian ilmiah, dan bukti-bukti riset sebagai instrumen strategis untuk membangun kredibilitas narasi advokasi. Menurut Cox

(2010), penggunaan bukti saintifik berfungsi sebagai "kontra-pengetahuan" (counter-knowledge) yang menantang klaim otoritas pemerintah atau korporasi yang sering kali cenderung meminimalisir atau bahkan menyangkal dampak kerusakan lingkungan. Dalam konteks krisis pesisir Semarang, dimensi ini mencakup penggunaan data kuantitatif seperti laju penurunan muka tanah yang mencapai 8-10 cm per tahun, proyeksi kenaikan permukaan air laut berdasarkan skenario perubahan iklim, serta analisis dampak sosial-ekonomi terhadap komunitas pesisir untuk membuktikan bahwa krisis yang terjadi memerlukan pendekatan adaptasi yang lebih komprehensif dan transformatif, bukan sekadar pembangunan infrastruktur fisik yang bersifat teknokratis. Advokasi berbasis data ini juga mencakup produksi pengetahuan alternatif melalui riset partisipatif yang melibatkan komunitas lokal, sehingga suara dan pengalaman masyarakat terdampak dapat direpresentasikan secara ilmiah dalam arena kebijakan.

## 2). Advokasi Hukum (Litigasi)

Dimensi ini digunakan sebagai mekanisme formal untuk menuntut akuntabilitas negara dan korporasi melalui jalur legal dan konstitusional. Cox (2010) memandang strategi hukum atau litigasi bukan hanya sebagai upaya untuk memenangkan perkara di pengadilan semata, tetapi lebih sebagai alat strategis untuk memaksa transparansi dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa hak-hak ekologis warga dilindungi oleh konstitusi dan regulasi yang berlaku, serta menciptakan preseden hukum yang dapat memperkuat perlindungan lingkungan di masa depan. Strategi ini mencakup peninjauan kritis terhadap proses pemberian izin lingkungan yang seringkali tidak melibatkan partisipasi publik yang memadai, pengujian kepatuhan kebijakan adaptasi terhadap regulasi perlindungan lingkungan hidup yang berlaku, serta gugatan terhadap proyek-proyek pembangunan yang mengabaikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Melalui dimensi hukum ini, advokasi tidak hanya bekerja di ranah politik tetapi juga memanfaatkan sistem hukum sebagai arena kontestasi untuk memperjuangkan keadilan ekologis.

### 3). Advokasi Akar Rumput (*Grassroots*)

Dimensi ini berfungsi sebagai fondasi kekuatan gerakan dan legitimasi sosial dari advokasi lingkungan. Dimensi akar rumput berfokus pada pengorganisasian, mobilisasi, dan pemberdayaan masyarakat yang terdampak langsung oleh krisis lingkungan agar mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses advokasi. Cox (2010) menekankan pentingnya mobilisasi komunitas untuk merebut kembali suara mereka di ruang publik yang seringkali didominasi oleh aktor negara dan korporasi. Melalui dimensi ini, advokasi bertujuan untuk mengubah posisi masyarakat dari sekadar objek kebijakan yang pasif menjadi subjek aktif yang memiliki agensi dan mampu merumuskan solusi adaptasi berbasis kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan kebutuhan riil yang mereka alami di lapangan. Advokasi akar rumput ini juga berfungsi untuk membangun solidaritas sosial, memperkuat kohesi komunitas, dan menciptakan basis sosial yang kuat bagi gerakan lingkungan jangka panjang.

Integrasi triangulasi strategi inilah advokasi lingkungan bertransformasi menjadi kekuatan yang holistik dan multidimensional dalam menghadapi kompleksitas krisis lingkungan secara strategis dan sinergis. Keandalan data dan bukti saintifik memberikan dasar argumen yang kokoh dan kredibel, instrumen hukum memberikan tekanan formal dan mekanisme akuntabilitas yang mengikat, sementara basis massa akar rumput memberikan legitimasi moral, politik, dan sosial yang memperkuat posisi tawar advokasi dalam arena kebijakan. Sinergi ketiga dimensi ini memungkinkan aktor advokasi untuk tidak hanya merespons dampak krisis secara reaktif dan parsial, tetapi juga mampu mengintervensi akar permasalahan struktural dalam tata kelola lingkungan di wilayah pesisir secara proaktif dan berkelanjutan. Dalam konteks WALHI Jawa Tengah, penerapan kerangka advokasi tiga dimensi Cox ini menjadi landasan strategis untuk mengadvokasi kebijakan adaptasi perubahan iklim yang tidak hanya efektif secara teknis, tetapi juga inklusif, partisipatif, dan berkeadilan dalam melindungi hak-hak dan kesejahteraan masyarakat pesisir Semarang yang paling rentan terhadap dampak krisis iklim.

#### 1.5.4 Adaptasi Krisis Pesisir

Adaptasi terhadap krisis pesisir merupakan respons sosial-ekologis terhadap ancaman yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, seperti kenaikan muka air laut, penurunan muka tanah (*land subsidence*), dan intrusi air laut yang mengancam keberlanjutan ekosistem dan kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Fenomena-fenomena ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling memperkuat satu sama lain dan membentuk krisis berlapis yang sulit diprediksi secara linear. Di wilayah pesisir utara Kota Semarang, adaptasi menjadi isu strategis mengingat kota ini mengalami banjir rob yang semakin intens akibat kombinasi faktor alam dan antropogenik, termasuk ekstraksi air tanah yang masif, alih fungsi lahan, dan minimnya ruang hijau pesisir. Kondisi ini menempatkan Semarang sebagai salah satu kota pesisir di Asia Tenggara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim. Menurut Zulfan dan Manar (2024), kebijakan penanggulangan bencana di Semarang sering kali bersifat reaktif merespons kejadian bencana setelah terjadi tanpa menyentuh akar permasalahan strukturalnya. Sementara adaptasi yang efektif membutuhkan pendekatan yang berkelanjutan dan partisipatif, terutama melalui penguatan kapasitas masyarakat pesisir agar mampu merespons tekanan ekologis secara mandiri dan kolektif.

Konsep adaptasi pesisir di Semarang berkembang dari paradigma manajemen risiko konvensional yang bersifat *top-down* menjadi pendekatan berbasis ekosistem dan sosial yang lebih inklusif. Pergeseran paradigma ini mencerminkan pengakuan bahwa ancaman pesisir tidak dapat diselesaikan semata-mata melalui intervensi teknis tanpa mempertimbangkan dimensi sosial dan budaya komunitas yang terdampak. Pentingnya integrasi antara dimensi lingkungan, kebencanaan, dan sosial dalam membangun ketahanan pesisir yang holistik dan berkelanjutan. Adaptasi tidak hanya berarti membangun infrastruktur fisik seperti tanggul laut, pompa air, atau sistem peringatan dini, tetapi juga menciptakan sistem sosial yang tangguh melalui penguatan modal sosial, revitalisasi kearifan lokal, dan penguatan jaringan komunitas antarkampung. Konsep ini dikenal sebagai *community-based adaptation* (CBA), di mana masyarakat tidak lagi diperlakukan sebagai objek kebijakan, melainkan menjadi subjek utama yang berdaulat

dalam menentukan bentuk dan arah adaptasi yang sesuai dengan konteks sosial-budaya setempat. Pendekatan CBA juga mengandaikan adanya mekanisme deliberasi dan negosiasi yang terbuka antara warga, pemerintah lokal, dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan adaptasi.

Dalam konteks krisis ekologis yang dihadapi Semarang, WALHI Jawa Tengah memandang adaptasi bukan semata sebagai proses teknis-administratif, melainkan sebagai proses politik yang sarat dengan relasi kekuasaan, kepentingan, dan ketimpangan struktural. Pandangan ini menempatkan adaptasi dalam bingkai keadilan ekologis (*ecological justice*), yang menuntut redistribusi risiko dan manfaat secara adil di antara kelompok-kelompok yang terdampak, khususnya warga pesisir yang selama ini paling menanggung beban krisis namun paling sedikit dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Adaptasi harus berangkat dari keberpihakan terhadap warga pesisir, bukan hanya proyek pembangunan berskala besar yang lebih berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan estetika kota. WALHI menolak pendekatan adaptasi yang dikendalikan oleh korporasi atau pemerintah tanpa melibatkan masyarakat terdampak secara bermakna, karena pendekatan semacam itu berpotensi melanggengkan ketimpangan struktural di kawasan pesisir utara dan menciptakan bentuk-bentuk baru penggusuran ekologis (*ecological displacement*) yang menggeser warga dari lingkungan tempat tinggal mereka atas nama pembangunan ketahanan iklim.

Kecenderungan kooptasi pemerintah dalam tata kelola adaptasi lingkungan di Jawa Tengah, narasi adaptasi digunakan untuk melegitimasi proyek-proyek pembangunan yang sejatinya mengabaikan kepentingan ekologis masyarakat. Kooptasi ini terjadi ketika agenda adaptasi iklim dijadikan justifikasi bagi proyek infrastruktur berskala besar yang dirancang tanpa partisipasi bermakna dari warga, sehingga hasilnya lebih mencerminkan kepentingan modal daripada kebutuhan riil komunitas pesisir. Mereka menunjukkan bahwa kebijakan seperti pembangunan tanggul laut dan reklamasi pantai sering kali lebih menguntungkan kepentingan ekonomi dan properti daripada kebutuhan ekologis masyarakat yang bergantung langsung pada ekosistem pesisir. Dalam

kondisi seperti ini, organisasi masyarakat sipil seperti WALHI memainkan peran ganda yang krusial: sebagai pengawas (*watchdog*) yang memantau dan mengkritisi kebijakan yang tidak adil, sekaligus sebagai agen pemberdayaan warga yang mendampingi komunitas pesisir dalam menyuarkan hak-hak ekologis mereka. Peran ini penting untuk memastikan kebijakan adaptasi berpihak pada keadilan ekologis dan sosial, serta tidak sekadar menjadi instrumen akumulasi capital.

Selain intervensi struktural yang bersifat makro, adaptasi juga dilakukan melalui penguatan kesadaran masyarakat dan praktik-praktik kolektif di tingkat akar rumput yang sering kali luput dari perhatian kebijakan formal. Bentuk-bentuk adaptasi lokal ini mencerminkan kapasitas laten masyarakat pesisir untuk merespons ancaman ekologis dengan memanfaatkan sumber daya sosial dan budaya yang mereka miliki, meski dalam kondisi keterbatasan material yang signifikan. Rahmadhani (2024) menjelaskan bahwa masyarakat di Kelurahan Mangkang Wetan, salah satu wilayah pesisir Semarang yang rentan terhadap rob, mengembangkan bentuk adaptasi lokal yang organik melalui praktik gotong royong dalam pemeliharaan tanggul darurat, pengelolaan drainase berbasis inisiatif warga, dan mekanisme relokasi berbasis musyawarah yang mempertimbangkan aspek sosial dan kultural komunitas. Adaptasi semacam ini memperlihatkan bahwa ketahanan pesisir tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan infrastruktur fisik, tetapi juga bahkan terutama oleh nilai-nilai sosial seperti kepercayaan, solidaritas, dan kohesi komunitas yang terbentuk melalui pengalaman kolektif menghadapi bencana. Praktik-praktik adaptasi lokal ini juga menegaskan bahwa pengetahuan masyarakat tentang lingkungan pesisir mereka sendiri merupakan sumber daya epistemis yang berharga dalam merancang kebijakan adaptasi yang efektif dan kontekstual.

Dengan demikian, konsep adaptasi krisis pesisir di Semarang tidak bisa dilepaskan dari relasi yang kompleks dan dinamis antara negara, masyarakat, dan lingkungan dalam konteks perubahan iklim global. Ketiga elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling membentuk dan menegaskan dalam proses adaptasi yang berlangsung di berbagai skala dari rumah tangga pesisir hingga kebijakan kota. Adaptasi bukan

sekadar upaya teknokratis untuk mengatasi rob dan banjir melalui solusi-solusi teknis yang dapat diukur dan direplikasi, tetapi juga merupakan medan perjuangan sosial yang menuntut keterlibatan aktif masyarakat sipil, pengakuan atas hak-hak ekologis warga pesisir, dan transformasi relasi kuasa yang selama ini menempatkan komunitas rentan sebagai pihak yang paling terbebani namun paling sedikit berdaya. Dalam kerangka ini, adaptasi yang sejati mensyaratkan tidak hanya perubahan infrastruktur dan kebijakan, tetapi juga perubahan cara pandang dan distribusi kekuasaan dalam tata kelola pesisir yang lebih demokratis, berkeadilan, dan berkelanjutan.

## **1.6 Definisi Konsep**

### **1.6.1 Peran LSM**

Peran LSM didefinisikan sebagai seperangkat fungsi, tanggung jawab, dan orientasi ideologis yang dijalankan oleh organisasi masyarakat sipil dalam rangka mempengaruhi perubahan sosial, politik, dan ekonomi. Peran ini terbentuk melalui negosiasi dan kontestasi dengan struktur kekuasaan yang ada serta menjadi mesin penggerak perubahan menuju keadilan sosial dan ekologis. Dalam konteks penelitian ini, peran LSM merujuk pada bagaimana WALHI Jateng memposisikan diri sebagai aktor advokasi yang berupaya mengubah kebijakan adaptasi perubahan iklim di pesisir Semarang agar lebih responsif, inklusif, dan berkeadilan dalam memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat pesisir utara Kota Semarang.

### **1.6.2 Advokasi Lingkungan**

Advokasi lingkungan didefinisikan sebagai tindakan komunikatif strategis yang dilakukan dalam ruang publik untuk mengubah relasi kuasa dan mempengaruhi kebijakan lingkungan. Konsep ini tak sekedar pemahaman konvensional tentang advokasi sebagai penyebaran informasi, melainkan menekankan upaya deliberatif untuk melakukan reframing terhadap narasi krisis lingkungan guna mendorong transformasi kebijakan fundamental. Dalam konteks penelitian ini, advokasi lingkungan merujuk pada triangulasi strategi yang dijalankan WALHI Jateng untuk mempengaruhi kebijakan

adaptasi perubahan iklim di pesisir Semarang melalui integrasi dimensi saintifik, hukum, dan *grassroots*.

### **1.6.3 Adaptasi Krisis Pesisir**

Adaptasi Krisis Pesisir dalam konteks ini didefinisikan sebagai respons sosial-ekologis transformatif terhadap ancaman perubahan iklim seperti banjir rob dan penurunan muka tanah yang mengalihkan paradigma intervensi fisik-teknokratis menuju penguatan kapasitas mandiri masyarakat melalui pendekatan *Community Based Adaptation* (CBA). Konsep ini memandang adaptasi bukan sekadar prosedur teknis-administratif, melainkan sebuah proses politik untuk mewujudkan keadilan ekologis (*ecological justice*) dan kedaulatan warga pesisir atas ruang hidupnya.

### **1.7 Operasionalisasi Konsep**

Operasionalisasi konsep dalam penelitian ini berfungsi untuk menerjemahkan gagasan teoritis ke dalam bentuk indikator empiris yang dapat diamati dalam konteks kualitatif. Dengan demikian, setiap konsep tidak hanya dijelaskan secara normatif, tetapi juga dipetakan secara fungsional dalam konteks peran WALHI Jateng dalam advokasi adaptasi krisis pesisir utara Kota Semarang. Ini difungsikan sebagai proses menerjemahkan konsep teoritis yang abstrak menjadi indikator-indikator empiris yang dapat diamati dan diukur dalam penelitian lapangan.

Dalam penelitian ini, operasionalisasi konsep dilakukan terhadap dua variabel utama yang menjadi fokus analisis, yaitu Peran LSM berdasarkan Teori Mansour Fakhri dan Advokasi Lingkungan berdasarkan Teori Robert Cox. Kedua variabel ini dioperasionalkan ke dalam dimensi-dimensi dan indikator-indikator spesifik yang memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi secara sistematis peran WALHI Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi perubahan iklim di pesisir utara Kota Semarang. Operasionalisasi kedua variabel penelitian ini membentuk kerangka analitis yang komprehensif untuk memahami kompleksitas peran WALHI Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi perubahan iklim di pesisir Semarang.

**Tabel 1 1.1 Operasionalisasi Konsep**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>	<b>Indikator</b>
Advokasi Lingkungan	Advokasi Berbasis Data (Saintifik)	1. Produksi Kontra Pengetahuan 2. Pelibatan Akademisi 3. Sosialisasi
Advokasi Lingkungan	Advokasi Hukum (Litigasi)	1. Pengawasan Kebijakan 2. Tranparansi Informasi 3. Litigasi Strategis 4. Pendampingan Hukum
Advokasi Lingkungan	Advokasi Akar Rumput ( <i>Grassroots</i> )	1. Pengorganisasian Masyarakat 2. Peningkatan Kapasitas 3. Komunikasi Risiko 4. Solidaritas Lintas Sektor 5. Kampanye Media Kreatif

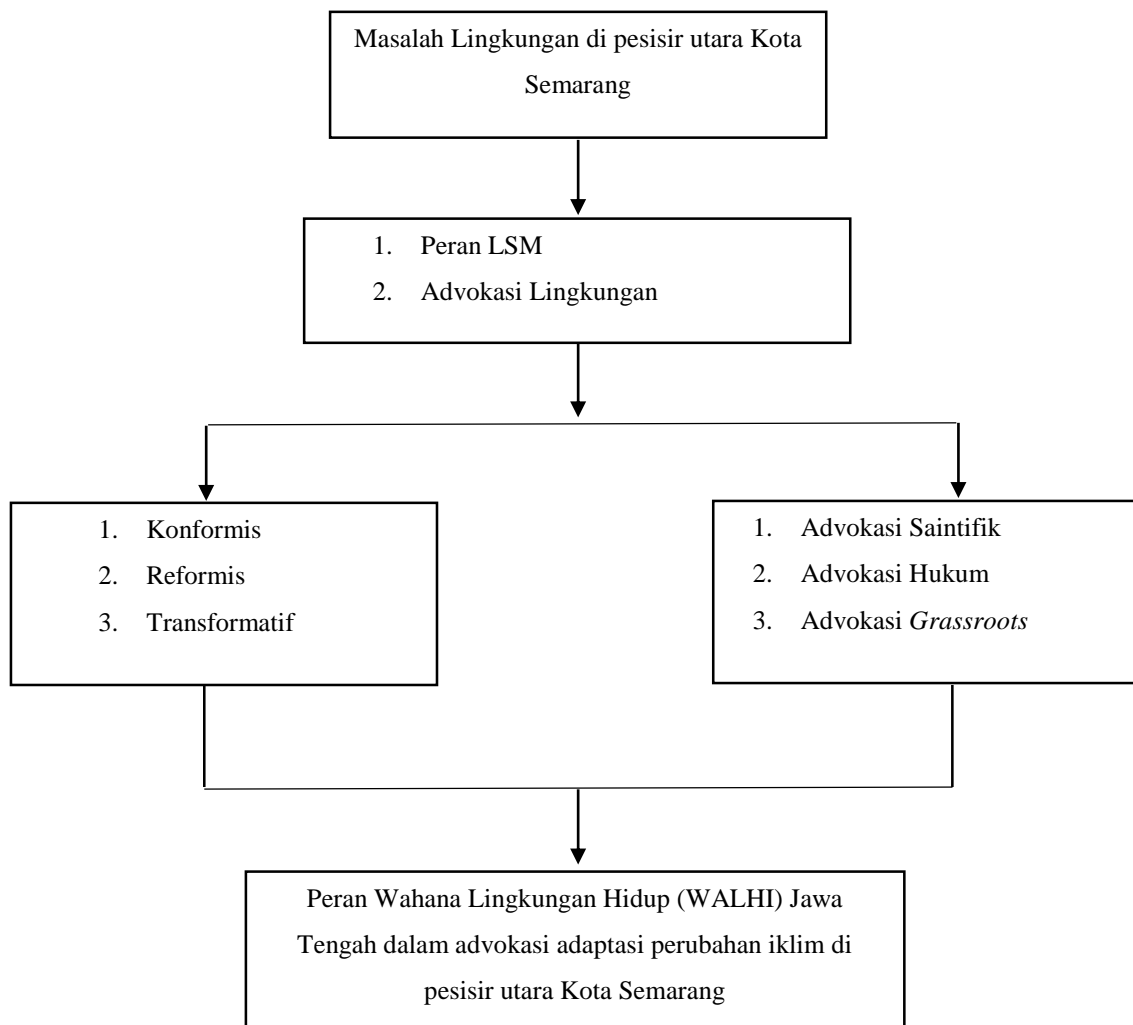
Integrasi antara Teori Peran LSM Mansour Fakih dan Teori Advokasi Lingkungan Robert Cox memungkinkan penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi aktivitas konkret yang dilakukan WALHI, tetapi juga menganalisis orientasi ideologis dan strategi politik yang mendasarinya. Spektrum tiga paradigma peran LSM dari Fakih memberikan instrumen untuk mengevaluasi sejauh mana WALHI mengadopsi orientasi konformis, reformis, atau transformatif, sementara triangulasi strategi tiga dimensi advokasi dari Cox memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana WALHI mengintegrasikan kekuatan bukti ilmiah, instrumen hukum, dan mobilisasi grassroots.

Keterkaitan antara kedua kerangka teoretis ini terletak pada pemahaman bahwa efektivitas advokasi tidak hanya ditentukan oleh strategi teknis yang digunakan (dimensi Cox), tetapi juga oleh orientasi ideologis LSM terhadap sistem kekuasaan yang ada (paradigma Fakih). LSM yang mengadopsi paradigma transformatif akan cenderung menggunakan advokasi berbasis data untuk memproduksi kontra-pengetahuan yang

menantang narasi dominan, advokasi hukum untuk menciptakan preseden yang mengubah struktur kebijakan, dan advokasi grassroots untuk membangun gerakan sosial yang mandiri dan kritis. Dalam konteks penelitian tentang WALHI Jateng di pesisir Semarang, operasionalisasi konsep ini memungkinkan analisis kritis apakah WALHI telah menjalankan peran transformatif yang sejalan dengan visi keadilan ekologis, atau masih berada dalam paradigma reformis yang berupaya memperbaiki sistem tanpa mengubah struktur fundamental ketidakadilan.

## 1.8 Kerangka Berpikir

### Bagan Kerangka Berpikir



Kerangka berpikir ini menunjukkan hubungan kausal dan dialektis antara teori dan praktik sosial dalam konteks gerakan lingkungan. Secara ontologis, teori peran LSM Mansour Fakih diposisikan sebagai paradigma dasar yang memandang setiap tindakan sosial sebagai bagian dari perjuangan emansipatoris melawan ketidakadilan struktural. Dalam kerangka ini, WALHI Jateng dipandang bukan sekadar lembaga advokasi lingkungan, tetapi juga aktor sosial yang memiliki kesadaran kritis terhadap ketimpangan sosial-ekologis akibat pembangunan yang eksploitatif.

Secara epistemologis, teori tersebut diinternalisasi melalui konsep advokasi lingkungan, yang menjadi instrumen strategis dalam mengartikulasikan peran-peran sosial ke dalam tindakan nyata. Advokasi ini dijalankan melalui berbagai mekanisme advokasi kebijakan, hukum, pendidikan publik, dan pemberdayaan komunitas yang secara simultan berfungsi sebagai sarana untuk memperjuangkan hak-hak ekologis masyarakat pesisir Semarang. WALHI Jateng disini, berperan sebagai fasilitator kesadaran kritis sekaligus penghubung antara masyarakat dan negara dalam proses perubahan kebijakan.

Sementara secara aksiologis, hasil dari proses advokasi tersebut diwujudkan dalam bentuk adaptasi krisis pesisir, yang menggambarkan transformasi sosial-ekologis masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan degradasi lingkungan. Adaptasi ini mencakup peningkatan ketahanan sosial, penerapan praktik ramah lingkungan, serta terwujudnya keadilan ekologis dalam pengelolaan ruang pesisir. Dengan demikian, keberhasilan adaptasi bukan hanya diukur dari aspek fisik atau teknis, tetapi dari tumbuhnya kesadaran ekologis kolektif dan keadilan sosial yang diperjuangkan melalui advokasi.

Kerangka berpikir ini menegaskan bahwa teori peran Fakih menyediakan pijakan konseptual untuk memahami mengapa WALHI bertindak; advokasi lingkungan menjelaskan bagaimana peran itu diwujudkan; dan adaptasi pesisir menunjukkan apa dampak nyata dari tindakan tersebut. Dengan demikian, hubungan ketiganya bersifat

integratif dan reflektif, membentuk alur penelitian yang logis, koheren, dan sesuai dengan paradigma penelitian kualitatif dalam konteks

## **1.9 Metode Penelitian**

### **1.9.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan jenis pendekatan penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif adalah upaya peneliti mengumpulkan data yang didasarkan pada latar ilmiah (David Williams, 1995). Penelitian kualitatif bertujuan menggambarkan suatu fenomena tertentu dengan bertumpu pada prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan berupa lisan secara holistik (utuh). Selain itu, dalam metode ini, langkah kerja yang dilakukan yaitu mendeskripsikan suatu objek dan fenomena dalam suatu tulisan yang bersifat naratif. Artinya, data, fakta, yang dihimpun berbentuk kata atau gambar bukan suatu angka. Penelitian kualitatif berusaha untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan apa yang ada (Bisa mengenai kondisi atau hubungan yang ada, proses yang sedang berlangsung, akibat atas efektivitas yang sedang berlangsung).

### **1.9.2 Lokasi dan Subjek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di pesisir utara Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Adapun yang menjadi Subyek dalam penelitian ini adalah informan dari WALHI Jawa Tengah yakni, Nur Cholis sebagai Deputy Direktur dan Bagas Kurniawan PIC Pesisir. Kemudian Informan unsur Ahli melibatkan dari Ikatan Ahli Perencanaan Jawa Tengah yakni, Arif Gandapurnama sebagai Ketua. Selanjutnya melibatkan 3 masyarakat yang kemudian mengalami dampak dari perubahan iklim di pesisir utara Semarang yakni, Ahmad Marzuki, Fajril, dan Ana muafidah.

Metode pemilihan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik *purposive* yang dimaksud adalah dengan teknik penentuan sampel dengan adanya pertimbangan tertentu. Menurut Arikunto di dalam bukunya, teknik *purposive* sampling adalah teknik mengambil data dengan tidak berdasar acak atau random, melainkan berdasarkan adanya pertimbangan-pertimbangan untuk mencapai target atau fokus tujuan tertentu (Arikunto,

2006). Kemudian, teknik sampel aksidental adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **1.9.3 Sumber Data**

#### **1.9.3.1 Data Primer**

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi.

#### **1.9.3.2 Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data yang didapatkan dari arsip yang dimiliki oleh WALHI Jawa Tengah, studi pustaka, penelitian terdahulu, literatur, dan jurnal yang berhubungan dengan peran Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Jawa Tengah dalam advokasi adaptasi perubahan iklim di pesisir utara Kota Semarang pasca pandemic covid 19.

### **1.9.4 Teknik Pengumpulan Data**

#### **1.9.4.1 Observasi**

Teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek penelitian. Pada penelitian ini, penulis melakukan pengamatan dengan mengikuti alur gerakan sosial yang dilakukan oleh WALHI Jawa Tengah.

#### **1.9.4.2 Wawancara**

Penulis mengadakan tanya jawab langsung dengan semua pihak yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan WALHI Jawa Tengah dan Informan pendukung lainnya.

#### **1.9.4.3 Studi Kepustakaan**

Mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam

penelitian ini. Penulis mengumpulkan data antara lain yang di publikasikan oleh WALHI Jawa Tengah pasca covid-19.

### **1.9.5 Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data adalah proses penelitian yang dilaksanakan setelah semua data yang dibutuhkan untuk memecahkan persoalan atau permasalahan yang diteliti telah didapatkan secara lengkap. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis dari Miles & Huberman. Penulis menganalisis jawaban berdasarkan hasil wawancara yang telah dilaksanakan. Apabila jawaban yang diperoleh penulis dirasakan belum memuaskan, peneliti akan memberikan pertanyaan lanjutan sampai didapatkannya data yang kredibel. Analisis data menurut Miles & Huberman (1992: 16) analisis terdiri dari tiga buah alur yang terjadi secara bersamaan yaitu:

- 1) *Data Reduction* (Reduksi Data), data yang sudah dikumpulkan akan dikategorikan atau dikelompokkan menjadi data yang sangat penting, kurang penting, dan tidak penting. Selanjutnya, penulis akan menyimpan mana data yang perlu dan membuang data yang tidak perlu untuk penelitian yang kemudian akan di analisis secara mendalam agar mendapatkan data yang kredibel.
- 2) *Data Display* (Penyajian Data), menampilkan data yang sudah direduksi ke dalam bentuk grafik, chart, dan lainnya. Tujuannya agar lebih mudah disampaikan dan dipahami oleh pihak lain serta akan memudahkan pembaca dalam menyerap informasi yang terdapat dalam data.
- 3) *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan kesimpulan), informasi yang diperoleh dari data yang sudah disusun dan dikelompokkan yang kemudian disajikan penarikan kesimpulan bisa berubah apabila penulis mendapatkan data terbaru dan bukti lain yang dapat memperkuat kredibilitas dan validitas dari penelitian ini. Penarikan kesimpulan dapat diletakkan paling akhir atau sebagai penutup dengan cara menjelaskan secara keseluruhan dari data yang telah ditemukan dan dianalisis.

### **1.9.6 Teknik Keabsahan Data**

Pada penelitian ini, penulis melakukan Uji Kredibilitas (*Credibility*). Dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan *member check*.